

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 22-24 Januari 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Sabtu, 22 Januari 2022	Menteri Basuki Tinjau Tol Trans Sumatera, Minta Perbaikannya Tuntas Akhir April 2022	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kondisi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Provinsi Lampung. Selain itu Basuki juga mengecek sebagian ruas Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapalbetung) di Sumatera Selatan, Jumat (21/1/2022).</p> <p>https://www.liputan6.com/bisnis/read/4866562/menteri-basuki-perintahkan-perbaikan-tol-trans-sumatera-tuntas-akhir-april-2022</p> <p>https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5909322/cek-jalan-tol-trans-sumatera-basuki-minta-perbaikan-kelar-april</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220123/45/1492169/menteri-pupr-minta-perbaikan-jalan-tol-trans-sumatera-yang-rusak-di-percepat</p> <p>https://independensi.com/2022/01/22/menteri-basuki-tinjau-tol-trans-sumatera-minta-perbaikannya-tuntas-akhir-april-2022/</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/392917/tinjau-tol-trans-sumatera-menteri-pupr-ri-minta-perbaikan-tol-tuntas-akhir-april-2022</p> <p>https://mediaindonesia.com/nusantara/466143/menteri-pupr-minta-perbaikan-tol-trans-sumatera-tuntas-akhir-april</p> <p>https://mitrapol.com/2022/01/21/tinjau-tol-trans-sumatera-menteri-basuki-minta-perbaikan-jalan-tol-tuntas-akhir-april-2022/</p> <p>https://www.merdeka.com/uang/menteri-basuki-minta-perbaikan-tol-trans-sumatera-tuntas-akhir-april-2022.html</p> <p>https://www.industry.co.id/read/101134/tinjau-tol-trans-sumatera-menteri-basuki-minta-perbaikan-jalan-tol-tuntas-akhir-april-2022</p>
2	Kompas.com	Sabtu, 22 Januari 2022	Kementerian PUPR akan terapkan 3D Printing untuk bangun rumah khusus	<p>Pembangunan rumah khusus akan menggunakan metode digital untuk melaksanakan teknologi industri 4.0. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tahun 2022 ini akan menerapkan teknologi 3D Printing dalam pembangunan rumah khusus. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto</p>

				<p>menerangkan pada 2021 Kementerian PUPR bersama mitra terkait telah melakukan uji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta mulai 12-31 Januari 2021.</p> <p>https://finance.detik.com/properti/d-5910080/canggih-kementerian-pupr-mau-bikin-rumah-pakai-teknologi-3d-printing.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/2659953/kementerian-pupr-akan-terapkan-3d-printing-untuk-bangun-rumah-khusus</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/22/190000821/teknologi-3d-printing-resmi-digunakan-pemerintah-bangun-rumah-khusus</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220122/47/1492083/manfaatkan-industri-40-kementerian-pupr-bakal-bangun-rumah-khusus</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/393038/kementerian-pupr-ri-manfaatkan-teknologi-3d-printing-untuk-bangun-rumah-khusus</p> <p>https://investor.id/business/279520/pupr-terapkan-3d-printing-bangun-rumah-khusus</p> <p>https://mitrapol.com/2022/01/23/masuki-era-industri-4-0-kementerian-pupr-manfaatkan-teknologi-3d-printing-untuk-bangun-rumah-khusus/</p> <p>https://www.beritasatu.com/ekonomi/882237/kementerian-pupr-bangun-rumah-khusus-pakai-3d-printer</p> <p>https://www.medcom.id/properti/news-properti/JKR3y6VN-populer-properti-mengatasi-rumah-lembap-hingga-bangun-hunian-khusus-dengan-3d-printing</p>
3	Kontan.co.id	Sabtu, 22 Januari 2022	Menteri PUPR Bakal Permudah Izin Jasa Konstruksi	<p>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal memberikan keringanan izin usaha konstruksi. Hal itu dilakukan untuk mempermudah iklim usaha jasa konstruksi. Basuki mengungkapkan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik.</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220123171014-92-750178/menteri-pupr-bakal-permudah-izin-jasa-konstruksi.</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220122/45/1492131/menteri-pupr-kalau-ada-aturan-yang-menyulitkan-pengusaha-pasti-akan-diperbaiki</p>

				<p>https://www.antaranews.com/berita/2659737/menteri-pupr-siapkan-keringanan-izin-usaha-jasa-konstruksi</p> <p>https://investor.id/business/279521/kementerian-pupr-pastikan-kemudahan-berusaha-bagi-perusahaan-konstruksi</p> <p>https://kumparan.com/kumparanbisnis/ju-taan-tukang-bangunan-terancam-menganggur-menteri-pupr-siapkan-keringanan-izin-1xMYiTuwGLB</p> <p>https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-menyiapkan-keringanan-izin-usaha-konstruksi</p> <p>https://www.merdeka.com/uang/kebut-pembangunan-pemerintah-janjikan-kemudahan-izin-usaha-konstruksi.html</p> <p>https://www.industry.co.id/read/101143/permudah-iklim-usaha-menteri-basuki-siapkan-keringanan-izin-usaha-konstruksi</p> <p>https://www.medcom.id/properti/news-properti/zNAXjewK-kementerian-pupr-bakal-permudah-izin-usaha-jasa-konstruksi</p>
4	Bisnis.com	Sabtu, 22 Januari 2022	Pembangunan IKN, Kementerian PUPR Belum Dapat Anggaran	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saat ini kementerian masih menunggu perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juga anggaran dari Kementerian Keuangan.</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220122/45/1492096/pembangunan-ikn-kementerian-pupr-belum-dapat-anggaran</p> <p>https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-pupr-belum-ada-anggaran-pembangunan-ikn-belum-bisa-mulai-1xMD4R8dFBI</p> <p>https://www.merdeka.com/uang/pembangunan-ibu-kota-baru-andalkan-apbn-sampai-2024.html</p>
5	Detik.com	Minggu, 23 Januari 2022	Besok! Tol Cisumdawu Seksi 1 Beroperasi	<p>Tol Cisumdawu bakal beroperasi mulai besok, Senin 24 Januari 2021. Tol yang beroperasi adalah Cisumdawu Seksi 1 Cileunyi-Rancakalong sepanjang 11,45 kilometer (km). "Seksi 1 aja (yang besok resmi beroperasi)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian melalui pesan singkat kepada detikcom, Minggu (23/1/2022).</p> <p>https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5911151/besok-tol-cisumdawu-seksi-1-beroperasi</p>

Judul	Konsep IKN Wakili Identitas Bangsa	Tanggal	24 Januari 2022
Media	Media Indonesia, Halaman 1		
Resume	Terkait dengan IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, eksekusi pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo dan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).		

Konsep IKN Wakili Identitas Bangsa

Kadin Indonesia berharap peluang kerja dan investasi di ibu kota negara lebih diutamakan bagi pengusaha dalam negeri.

ARNOLDUS DHAE
arnoldtanti@mediaindonesia.com

PEMERINTAH resmi bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan dilakukan sejak beberapa tahun lalu, termasuk soal desain arsitektur IKN.

Sayembara desain IKN ini dimenangi oleh Nyoman Nuarta, 70, seniman asal Tabanan, Bali. Saat diwawancarai *Media Indonesia* kemarin, Nuarta menyebut desain IKN menunjukkan identitas Indonesia sebagai bangsa. "IKN itu idealnya harus menunjukkan identitas Indonesia sebagai bangsa besar dan bermartabat di dunia. Saya juga jelaskan bahwa sudah saatnya Indonesia tidak meniru asing. Kita punya identitas diri, punya kekayaan dan budaya sendiri. Kalau hanya meniru asing, semua juga bisa," ujarnya.

Nuarta akhirnya mendesain IKN dalam konsep burung garuda. Dalam tubuh burung garuda, presiden akan berkantor, ditambah dengan unsur-unsur pendukung seperti sekretariat negara, sekretariat kabinet, dan kantor staf presiden. "Kalau menyebut nama burung garuda, itulah Indonesia. Negeri dengan sejarah panjang yang dikaruniai keragaman etnik dan bahasa, hutan tropis dengan kekayaan vegetasi yang tak ternilai harganya," tambahnya.

Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development Institute, Yayat Supriatna, menilai tujuan ibu kota negara sebagai kota berkelanjutan akan membuat IKN menjadi kota yang efektif dan efisien. "Jadi, IKN betul-betul dibangun sebagai kota yang bebas polusi, ramah lingkungan, dan memanfaatkan teknologi energi terbarukan," ujar Yayat, Jumat (21/1).

Terkait dengan IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

menuturkan, eksekusi pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo dan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan skema pembiayaan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. "Otoritas fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas skema pendanaan IKN," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Si-manjorang berharap peluang kerja dan investasi di IKN lebih diutamakan bagi pengusaha dalam negeri. "Dunia usaha kini menunggu sosialisasi UU IKN beserta aturan turunannya, khususnya menyangkut peluang usaha dan investasi beserta persyaratan, perizinan, dan mekanismenya," kata Sarman.

Calon kepala IKN

Pemerintah kini juga tengah menyiapkan payung hukum turunan untuk IKN seperti peraturan presiden mengenai penetapan kawasan strategis nasional calon ibu kota negara dan otorita persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Sejumlah nama muncul mengenai sosok yang akan menjadi kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Basuki Tjahaja Purnama sendiri enggan berkomentar soal wacana itu. "Off the record," ujarnya, kemarin.

Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia Bernardus Djonoputro menilai Ridwan Kamil memenuhi syarat. Menurut dia, kepala otorita IKN harus mampu menjadi arsitek sekaligus mengurai masalah sosial politik yang kompleks. (Mir/Ind/Des/Pra/Ant/X-11)

Judul	Pembangunan IKN Bergantung Kesiapan APBN	Tanggal	24 Januari 2022
Media	Investor Daily, Halaman 6		
Resume	Terkait dengan IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, eksekusi pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo dan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).		

Pembangunan IKN Bergantung Kesiapan APBN

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah membuat perencanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, pembangunan baru bisa dijalankan saat anggaran sudah tersedia.

Oleh Arnoldus Kristianus dan Triyan Pangastuti

Menurutnya, sampai saat ini, pemerintah masih pada tahap mempersiapkan anggarannya. “Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi kami belum bisa lakukan apa-apa, kami persiapan saja,” ucap Basuki di Hotel Bidakara, Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk tahap awal pembangunan, lanjutnya, akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 256 ribu hektare (ha). “Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024,” kata Basuki.

Dia mengatakan, pembangunan tahap awal tersebut semuanya dengan APBN. Mengenai investasi dalam pembangunan IKN, Basuki menuturkan sampai saat ini belum mendapatkan investasi dari pihak lain. “Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal *financing* saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sempat mengatakan, IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan, antara lain APBN, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemberdayaan peran swasta dan BUMN. “Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam



“Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi kami belum bisa lakukan apa-apa, kami persiapan saja.”

● Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Febrio.

Menurutnya, kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan, seperti pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga, bangunan strategis pangkalan militer, pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar, seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase. Sementara fasilitas lain seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi, dan sarana perbelanjaan akan didanai swasta atau KPBU.

Pembiayaan IKN, tambah Febrio, juga dapat ditekankan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan perubahan peruntukan aset (*asset repurposing*).

Contohnya, menyewakan BMN lama di ibu kota negara saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara.

Harus Hati-Hati

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani mengingatkan pemerintah supaya mencermati kebutuhan pendanaan IKN baru. Pasalnya, laman ikn.go.id pada Selasa (18/1) lalu, menampilkan angka kebutuhan dana IKN senilai Rp 375,7 triliun, di mana Rp 252,5 triliun dari APBN dan Rp 123,2 triliun dari KPBU, swasta, dan BUMN. Sedangkan versi buku saku IKN menyatakan, pendanaan ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun.

“Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus hati-hati dalam *manage* utang,” ujar dia.

Adapun posisi utang pemerintah

hingga Desember 2021 tercatat Rp 6.090,31 triliun atau setara 41% terhadap PDB. Rasio utang ini akan terus bertambah pada 2022, karena pemerintah akan kembali menambah utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk menambal kekurangan APBN 2022.

Ajib menegaskan, tahun ini akan menjadi krusial karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani pandemi Covid-19. “Di mana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3% PDB,” ucapnya.

Hal strategis kedua adalah mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal.

“Dengan disetujuinya UU IKN ini menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih *managable*,” imbuh Ajib.

Hal lainnya, pemerintah perlu mengukur biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi. Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal.

“Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Judul	Menteri PUPR Minta Perbaikan Tol Sumatera Selesai April	Tanggal	22 Januari 2022
Media	Investor Daily, Halaman 6		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kondisi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Provinsi Lampung. Selain itu Basuki juga mengecek sebagian ruas Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapalbetung) di Sumatera Selatan, Jumat (21/1/2022).		

Menteri PUPR Minta Perbaikan Tol Sumatera Selesai April

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Utama Karya (Perseero) dan PT Waskita Toll Road agar menuntaskan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada akhir April 2022.

"Saya minta perbaikan permanen bisa tuntas pada akhir April 2022 nanti.

Saya mengingatkan kembali bahwa SPM (standar pelayanan minimal) wajib

dipenuhi, karena masyarakat sudah membayar tarif tol dan harus mendapatkan layanan yang baik," kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya, Jumat (21/1). "Saya minta perbaikan permanen bisa tuntas pada akhir April 2022 nanti. Saya mengingatkan kembali bahwa SPM wajib dipenuhi karena masyarakat sudah membayar tarif tol dan harus mendapatkan layanan yang baik," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/1).

Menteri PUPR meninjau kondisi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Provinsi Lampung, dan sebagian ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) di Sumatera Selatan, Jumat (21/1).

Menteri Basuki meminta kepada BUJT PT Utama Karya (Perseero) dan PT Waskita Toll Road untuk secara cepat memperbaiki dan menutup lubang/retakan yang ada di ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Beberapa segmen jalan harus dilakukan rekondisi dan rekonstruksi, termasuk *levelling oprit* jembatan yang mengalami penurunan, karena berada pada tanah-tanah lunak atau rawa.

Menteri PUPR juga menaruh perhatian pada beton pembatas jalan tol yang retak atau turun. Saat ini tengah dilakukan penanganan oleh BUJT, antara lain dengan perbaikan lapisan perkerasan baru, dicor kembali dengan beton *fast setting*, lapisan perkerasan di-hampar menggunakan *asphalt finisher* dan dipadatkan, dan lapisan AC-WC baru di-hampar dengan *asphalt finisher* dan dipadatkan.

Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung hingga Kramasan-Palembang sepanjang 360 km merupakan lanjutan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang sudah beroperasi sejak Maret 2019. Pembangunan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan dan dari Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk Pulau Sumatera ke wilayah timur Sumatera.

Dalam tinjauannya tersebut, Menteri Basuki juga meminta kepada BUJT pengelola *rest area* KM 234 A untuk memperbanyak penghijauan dengan pohon berukuran besar. Penanaman pohon di *rest area* selain bertujuan untuk memperindah lingkungan dan lanskap kawasan juga bertujuan untuk membuat lebih rindang dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. (ros)



Basuki Hadimuljono

Judul	PUPR Siap Relaksasi Izin Usaha Konstruksi	Tanggal	24 Januari 2022
Media	Investor Daily, Halaman 7		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) siap merelaksasi syarat untuk kemudahan izin usaha konstruksi. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang sudah menjalankan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha.		

PUPR Siap Relaksasi Izin Usaha Konstruksi

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) siap merelaksasi syarat untuk kemudahan izin usaha konstruksi. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang sudah menjalankan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha.

Oleh Arnoldus Kritianus

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Musyawarah Umum Nasional (Munas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurut Menteri Basuki, salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan *reference asset* dari tiga tahun menjadi 10 tahun.

“Saya rasa ini masuk akal karena tiga tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi,” ujarnya.

Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi. “Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawati.

Iskandar berharap tahun ini industri konstruksi dapat kembali bergairah setelah digilas pandemi selama dua tahun terakhir. Apalagi, tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah.

“Dengan diteruskannya proyek infrastruktur oleh pemerintah, seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksanaan konstruksi nasional,” ujar dia.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga melaporkan meskipun di tengah pandemi, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022. Penandatanganan ini terdiri atas sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp 20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021.

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52%.

“Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus ber-



Target Operasional Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Foto udara pembangunan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/1/2022). Presiden Joko Widodo berharap, uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung yang saat ini sudah mencapai 79,9 persen sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2022, dan sudah siap operasional pada bulan Juni 2023.



Basuki Hadimuljono

kolaborasi kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Bahlil.

Bahlil juga memastikan, pihaknya terus mendorong percepatan perizinan, terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem *online single submission* (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata dia.

Libatkan Kontraktor Lokal

Sementara itu, pengurus dan anggota Gapensi berharap pemerintah

melibatkan kontraktor lokal untuk mengerjakan infrastruktur di daerah.

“Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen akan terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah. Kami berharap pemerintah bisa tetap melibatkan kontraktor swasta lokal di berbagai daerah untuk pekerjaannya,” kata Iskandar Z Hartawati.

Menurut Iskandar dengan keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19.

Senada dengan Iskandar, Wakil Ketua IX BPP Gapensi Didi Anisa mengatakan, bangkitnya industri konstruksi dapat menggerakkan roda ekonomi baik di daerah maupun pusat. Pasalnya, jasa konstruksi memiliki efek pengganda bagi sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lokal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

“Dampak bagi perekonomian sangat besar, baik untuk daerah dimana pembangunan infrastruktur tengah digencarkan, maupun di pusat, kuncinya adalah keterlibatan pelaku jasa konstruksi lokal,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum VI Gapensi Ruslan Rivali mengatakan, dalam Mukernas 2022 ini, Gapensi menyampaikan beberapa pokok pikiran

yang selama ini menjadi tantangan bagi para kontraktor di daerah dan pusat. Pokok pikiran tersebut antara lain mengenai relaksasi perizinan, persyaratan pertinan berusaha berbasis risiko di sektor PUPR, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga terendah untuk proyek infrastruktur pemerintah.

Kemudian, perlindungan bagi pengusaha pasar usaha kecil dan menengah dengan melarang Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktivitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah dan bantuan pembiayaan bagi pelaku jasa konstruksi nasional baik bank maupun nonbank.

“Selain itu, kami juga menyatakan dukungan terkait sertifikasi para kontraktor untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha sektor jasa konstruksi,” ujar dia.

Sementara itu, Sekjen sekaligus Ketua Penyelenggara M2G Gapensi Andy Rukman Karumpa berharap melalui Mukernas, pemerintah dan Gapensi bisa menemukan kesepakatan dan solusi agar tujuan pembangunan nasional dapat terlaksana.

Menurut dia, Gapensi dan pemerintah memiliki semangat yang sama dalam hal pembangunan nasional dan peningkatan perekonomian Indonesia. Itu sebabnya, ia yakin Gapensi dapat menjadi mitra pemerintah dan memberikan berbagai masukan dalam memensah target pembangunan infrastruktur Indonesia. (tm)